



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87/SJ TAHUN 2021  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan

- Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID BRSDM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPID BRSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- A. Atasan PPID BRSDM;
- B. PPID BRSDM; dan
- C. PPID Unit Pelaksana Teknis BRSDM.

KETIGA : PPID BRSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat PPID BRSDM dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Sekretariat PPID BRSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas:
- A. mendukung kelancaran tugas PPID BRSDM dan PPID Unit Pelaksana Teknis BRSDM dalam melakukan klasifikasi informasi;
  - B. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan dalam klasifikasi, tanggapan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan laporan tahunan layanan informasi publik;
  - C. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan Sekretariat PPID Kementerian dalam hal:
    1. mengelola, menyusun, dan mengklasifikasi informasi riset serta informasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
    2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia;
    3. menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID BRSDM dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat; dan
    4. melakukan pelayanan informasi satu data kelautan dan perikanan serta diseminasi hasil riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- KELIMA : Masa kerja PPID BRSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2021

an. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Tini Mariani



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 87/SJ TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN

- A. Atasan PPID BRSDM KP  
 Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP
- B. PPID BRSDM KP  
 Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP
- C. PPID UNIT PELAKSANA TEKNIS

No	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1	Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
2	Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
3	Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
4	Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
5	Kepala Balai Riset dan Observasi Laut	PPID Balai Riset dan Observasi Laut
6	Kepala Balai Riset Perikanan Laut	PPID Balai Riset Perikanan Laut
7	Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan	PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan
8	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias	PPID Balai Riset Budidaya Ikan Hias

No	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
9	Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	PPID Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
10	Direktur Poltek KP AUP Jakarta	PPID Poltek KP AUP Jakarta
11	Direktur Politeknik KP Sidoarjo	PPID Politeknik KP Sidoarjo
12	Direktur Politeknik KP Bitung	PPID Politeknik KP Bitung
13	Direktur Politeknik KP Sorong	PPID Politeknik KP Sorong
14	Direktur Politeknik KP Kupang	PPID Politeknik KP Kupang
15	Direktur Politeknik KP Karawang	PPID Politeknik KP Karawang
16	Direktur Politeknik KP Kupang	PPID Politeknik KP Kupang
17	Direktur Politeknik KP Bone	PPID Politeknik KP Bone
18	Direktur Politeknik KP Dumai	PPID Politeknik KP Dumai
19	Direktur Politeknik KP Pangandaran	PPID Politeknik KP Pangandaran
20	Direktur Politeknik KP Jembrana	PPID Politeknik KP Jembrana
21	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan
22	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal
23	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi
24	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon
25	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung
26	Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	PPID Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
27	Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	PPID Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
28	Kepala Loka Riset Perikanan Tuna	PPID Loka Riset Perikanan Tuna

No	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
29	Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut	PPID Loka Riset Budidaya Rumput Laut
30	Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
31	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
32	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman
33	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung
34	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
35	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak
36	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone
37	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru
39	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang
40	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

an. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Mariani



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 87/SJ TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Andi Soesmono, Koordinator Kerja Sama, Humas, dan Data, Sekretariat BRSDM KP	Koordinator Sekretariat PPID BRSDM
2.	Kasmawati, Pranata Humas Muda, Sekretariat BRSDM KP	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik
3.	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat, Sekretariat BRSDM KP	Koordinator Bidang Uji Konsekuensi
4.	Koordinator Sumber Daya Manusia Hukum dan Organisasi, Sekretariat BRSDM KP	Koordinator Bidang Sengketa Informasi
5.	Sub Koordinator Data, Sekretariat BRSDM KP	Koordinator Bidang Data dan Informasi
6.	Fristiya Heri Kartika, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pusat Riset Perikanan	Anggota
7.	Dani Saepuloh, Pranata Komputer Pertama, Pusat Riset Kelautan	Anggota
8.	Dedy Heru Susanto, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Subkoordinator Umum, Pusat Pendidikan KP	Anggota
9.	Muhammad Ihsan Zakariya, Calon Analis Kebijakan, Subkoordinator Evaluasi, Pusat Pendidikan KP	Anggota
10.	Ary Budhy Purwoko, Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Subkoordinator Evaluasi, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Anggota



No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
11.	Titin Hasanah, Pranata Humas Muda, Subkoordinator Kerja Sama dan Pelayanan Riset, Balai Besar Riset Sosial, Ekonomi KP	Anggota

an. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Martini

